
PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU NUKLIR IRAN DI DEWAN KEAMANAN PBB TAHUN 2007-2008

Asep Setiawan ^{*1}, Yanyan Mochamad Yani ²

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, DKI Jakarta, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung, Sumedang, Indonesia

e-mail: ^{*1}asepsetia@gmail.com, ²yan2m@hotmail.com

Abstract

This study is aimed to analyze Indonesia's foreign policy changes toward Iranian nuclear issue in The United Nations Security Council (UNSC) from 2007 to 2008. The Iranian nuclear issue became international focus when UNSC in 2006 decided the future of Iranian nuclear program. Nuclear proliferation's threat was debated in UNSC due to a new nuclear program launched by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad to build nuclear arsenal as soon as possible. As a non-permanent member of UNSC, Indonesia should participate in any decision within two years whether to support, abstain or to reject any resolutions decided.

The research used qualitative method with a case study type. Data was collected based on qualitative method through literature study and interviews in order to gain understanding why the changes occurred in Indonesia's foreign policy with domestic and international factors as consideration.

The research concluded that Indonesia's foreign policy changes was on international pressure to support new sanction on Iranian nuclear program in 2007. Indonesia's policy was criticized in domestic. After domestic pressure, Indonesia finally took abstain policy in a new resolution on Iran nuclear in UNSC on March 2008. In other words the Indonesian foreign policy changes can be classified in adjustment changes to appease domestic pressure and in the same time to avoid confrontation with major powers interests.

Keywords— *Change, foreign policy, nuclear issue, domestic, international*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu nuklir Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2007-2008. Isu nuklir Iran telah menyebabkan sorotan dunia internasional terutama sejak 2006 ketika dibawa menjadi masalah di Dewan Keamanan PBB. Ancaman proliferasi nuklir yang dipicu program nuklir Iran semakin nyata setelah Presiden Mahmoud Ahmadinejad bertekad membuat senjata nuklir secepat mungkin. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2007-2008, Indonesia harus mengambil kebijakan apakah mendukung sanksi PBB terhadap Iran atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara sehingga ditemukan rangkaian makna dari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang dipengaruhi faktor domestik dan internasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan internasional ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu nuklir Iran pada tahun 2007 dengan mendukung sanksi tambahan untuk Iran. Kebijakan Indonesia ini mendapat sorotan dari dalam negeri di Indonesia. Namun ketika resolusi baru PBB tentang nuklir Iran diputuskan bulan Maret 2008, Indonesia mengambil kebijakan abstain terhadap usulan sanksi baru untuk Iran karena program nuklirnya. Dengan kata lain perubahan kebijakan luar negeri Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perubahan yang sifatnya penyesuaian (*adjustment changes*) untuk mengakomodasi tekanan domestik dan pada saat yang sama menghindari konfrontasi dengan negara besar saat kebijakan luar negeri diambil

Kata kunci— Perubahan, kebijakan luar negeri, isu nuklir, domestik, internasional

1. Pendahuluan

Indonesia yang memiliki kebijakan untuk mendukung non-proliferasi nuklir dihadapkan pada masalah nyata harus mengambil keputusan apakah mendukung tekanan Barat kepada Iran untuk menghentikan program nuklirnya atau mengambil kebijakan lain. Tahun 2007 Indonesia mendukung sanksi tambahan melalui Resolusi 1747 di Dewan Keamanan PBB saat menjadi anggota tidak tetap badan PBB itu. Indonesia mengikuti 14 anggota Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China, Belgia, Kongo, Ghana, Italia, Panama, Peru, Qatar, Afrika Selatan dan Slovakia) menjatuhkan sanksi kepada Iran karena pengembangan nuklirnya.

Namun kemudian tahun 2008 ketika Indonesia masih duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena protes di dalam negeri atas kebijakan mendukung sanksi yang dimotori Barat pada tahun 2007, Posisi Indonesia berubah menjadi abstain saat dijatuhkan sanksi baru melalui Resolusi 1803. Sebelum kebijakan untuk abstain itu, aksi protes dilakukan DPR dalam bentuk interpelasi dan terjadi tarik menarik kepentingan antara DPR dan Pemerintah (Anwar, 2010: 37-54). Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia ini menjadi perhatian karena menimbulkan

kesan tidak konsisten dalam kebijakan luar negerinya terkait isu nuklir Iran tersebut.

Alasan perubahan kebijakan Indonesia ini masih menjadi pertanyaan mengapa dalam kebijakan luar negerinya di Dewan Keamanan PBB Indonesia tidak memiliki konsistensi. Meskipun para pejabat pemerintah telah memberikan alasan baik pada tahun 2007 maupun 2008 namun mengapa terjadinya perubahan kebijakan luar negeri itu masih belum jelas. Di sini tampak adanya persimpangan antara faktor domestik dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dengan faktor internasional dimana Indonesia tidak bisa lepas dari interaksi dengan negara lain termasuk dari Barat.

Studi mengenai konsistensi Indonesia dalam kebijakan luar negeri terkait isu nuklir Iran masih belum banyak dilakukan. Belum diketahui seberapa besar tekanan internasional terhadap kebijakan luar negeri Indonesia ini sehingga mendukung sanksi dan seberapa besar juga faktor domestik seperti elemen civil society mempengaruhi kebijakan luar negeri. Penelitian ini ingin mengisi kesenjangan dalam studi perubahan kebijakan luar negeri (*foreign policy change*) yang mengaitkan antara faktor internasional di satu sisi dengan faktor domestik di sisi lain dalam kasus nuklir Iran ini pada periode tahun 2007 sampai 2008.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Menurut Holsti (1982: ix) studi perubahan kebijakan luar negeri masih kurang mendapatkan perhatian. Holsti menyebutkan dalam pengantar buku *Why Nations Realign* bahwa:

“An aspect of foreign policy that has received little attention in the theoretical literature namely foreign policy change. A review of current writings reveals that the sources of foreign policy – public opinion, decision making, misperceptions, the personality drives of key policy-makers...have received more attention than actually policies...and even where policy is reviewed, rather static pictures emerge; continuity of the major powers’ foreign policy orientation seems to be the norm”.

Pandangan Holsti itu menjelaskan bahwa studi perubahan kebijakan luar negeri ini perlu mendapatkan perhatian. Perubahan kebijakan luar negeri ini sendiri merupakan bagian dari kajian analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*) yang menekankan kepada berbagai teknik, perspektif teoretis, pendekatan integratif, tingkat analisis bertingkat dan eksplanasi mengenai berbagai penyebab terjadinya keanekaragaman dalam kebijakan luar negeri.

Salah satu basis konseptual untuk studi perubahan kebijakan luar negeri ini dikembangkan Rosenau pada tahun 1970-an. Rosenau menyusun kerangka studi kebijakan luar negeri yang disebut dengan linkage theory (Rosenau, 1971: 309).

Konsep linkage theory ini, menurut Rosenau, adalah mengaitkan antara dua sistem yakni nasional dan internasional dalam perilaku sebuah negara.

Kemudian Rosenau menyebutkan adanya tiga konsepsi mengenai kebijakan luar negeri “*as cluster of orientations, as a set of communication to and plans for action and as a form of behavior*” (Rosenau, 1976: 16). Sebagai kluster orientasi kebijakan luar negeri merujuk kepada tendensi dan prinsip-prinsip yang menjadi rujukan perilaku negara dalam masalah internasional. Sebagai : “*set of communication to and plans for action*” adalah dimana sebuah negara menghubungkan diri kepada lingkungan eksternal dalam rencana dan komitmen yang konkret untuk mempromosikan dan melindungi diri di luar negeri yang sesuai dengan orientasi dasar negara itu. Konsep ini sering disebut sebagai strategi, keputusan atau kebijakan. Sedangkan pengertian ketiga kebijakan luar negeri sebagai kegiatan yang menerjemahkan orientasi dan pengembangan serta artikulasi tujuan dan komitmen spesifik. Konsep ini menjadikan kebijakan luar negeri merupakan perilaku ke lingkungan eksternal dari satu negara.

Dalam konteks penelitian ini *foreign policy* mengambil arti kebijakan luar negeri yang dalam pemaknaan Rosenau sebagai plans for action bukan sebagai kluster orientasi.

Lebih lanjut konsep perubahan kebijakan luar negeri ini dikaji lebih dalam oleh Gustavsson (1999) yang merangkum adanya lima model yaitu: Model yang dikembangkan Holsti (1982) tentang restrukturisasi kebijakan luar negeri; Goldmann (1988) model stabilisator di dalam sistem pengambilan keputusan; Hermann (1990) model sistem sibermetik

dalam pengambilan kebijakan sebagai variabel antara; Walter Carlsnaes (1992) model diakronis interaksi antara agensi dan struktur; model Skidmore yang menjelaskan perubahan dikondisikan oleh kondisi dalam negeri dan kekuatan eksternal; dan model Rosati (1994) mengenai periode stabilitas yang berhasil oleh periode transisi. Konsep perubahan kebijakan luar negeri dari sejumlah pakar itu menunjukkan berbagai pendekatan dalam menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri sebuah negara berubah.

Tabel 1. Model Perubahan Kebijakan Luar Negeri

	Checklist models		Structural constraints models		Cyclical models	
	Holsti (1982)	Hermann (1990)	Goldmann (1988)	Skidmore (1994)	Carlsnaes (1993)	Rosati (1994)
Foreign policy	Programme: intended and actual	Programme	Programme verbalized and non-verbalized	Programme	Programme and outcomes	Programme
Change	Typology	Graduated levels	Definition	Evolutionary vs sporadic	No specification	Graduated levels
Explanatory logic	Independent and interviewing variables	Independent variables and intervening decision-making process	Intervening stabilizers in policy-making system	Systemic and domestic combinations of power	Cyclical interplay between agency and structure	Cyclical shifts of stability and transition
Implications from empirical studies	Difficult to follow Other variables significant	Fails to capture subjective interpretation and capacity to anticipate	Certain variables in need of reconceptualization New variables needed	Only superficial empirical application	No empirical application	Risk for oversimplification of historical data
View of theory	Induction Unclear about future prospects	Induction Unclear about future prospects	Deduction Defends weak theory and weak tests	Deduction	Induction Advocates contingent generalizations	Deduction

Sumber: Gustavsson (1997)

Dalam Tabel 1 mengenai enam model perubahan kebijakan luar negeri Gustavsson menjelaskan variabel yang digunakan untuk memetakan model dalam perubahan kebijakan luar negeri yakni kebijakan luar negeri, perubahan, eksplanatori logis, implikasi bagi studi empiris pandangan teoretis. Gustavsson mengklasifikasikan Holsti dan Hermann sebagai Checklist Model, Goldmann dan Skidmore sebagai Structural Constrains Model dan Carsnaes dan Rosati sebagai *Cyclical Model*.

Dari enam model itu kemudian Gustavsson mengembangkan model ketujuh yang dengan terlebih dahulu menempatkan foreign policy seperti yang ditafsirkan Cohen and Harris (1975: 3831) sebagai : *“a set of goals, directives or intentions, formulated by persons in official; or authoritative positions, directed at some actor or condition in the environment beyond the sovereign state, for the purpose of affecting the target in the manner desired by the policy-makers”*.

Perubahan juga seperti dijelaskan Goldmann (1988:10) merujuk kepada *“either a new act in a given type of situation or a given act in a situation previously associated with a different act”*. Menurut Gustavsson, model yang dikembangkannya terdiri dari tiga langkah yakni identifikasi sejumlah sumber yang dimediasi oleh individual para pembuat kebijakan yang bertindak dalam proses pengambilan kebijakan yang akan membawa kedalam perubahan kebijakan luar negeri. Sumbernya terdiri dari dua yakni faktor internasional dan domestik.

Sumber internasional dari model Gustavsson antara lain faktor politik dan ekonomi. Faktor politik di tingkat internasional menyangkut kepada aspek hubungan kekuasaan antar negara dan hubungan yang menyangkut aspek militer dari keamanan nasional seperti ditafsirkan oleh perspektif realis. Sedangkan faktor ekonomi mengenai ekonomi internasional berkaitan dengan transaksi lintas batas dan lintas kelembagaan.

Faktor domestik dalam model Gustavsson terkait dukungan para pemilih, partai politik dan aktor masyarakat. Faktor ini menjelaskan bagaimana hasil pemilu, opini publik dan koalisi antara aktor politik utama. Faktor ekonomi tingkat domestik menyangkut antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Faktor domestik yang

diajukan Gustavsson ini sebenarnya juga sudah ditelaah misalnya oleh Rosenau ketika menjelaskan agregat input bagi kebijakan luar negeri. Gustavsson menjelaskan faktor-faktor dari tingkat domestik ini dalam pengertian yang lebih rinci seperti dukungan para pemilih yang dapat diketahui antara lain dari survei opini publik.

Model yang dikembangkan oleh Gustavsson tersebut, menurut peneliti, menggabungkan dua faktor penting dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri yakni faktor internasional dan domestik. Ini mengukuhkan pendapat bahwa analisis mengenai perubahan kebijakan luar negeri setidaknya menyertakan dua faktor ini. Dalam analisis perubahan itu Gustavsson menyertakan dua faktor dalam proses perubahan itu yakni aktor pengambil keputusan dan proses pengambilan kebijakan itu. Peneliti berpendapat model pengambilan kebijakan sudah diformulasikan oleh Allison sehingga sebenarnya proses itu tidak perlu dibahas lagi dalam model baru.

Di dalam variabel output Gustavsson memasukkan beberapa kategori perubahan dalam kebijakan luar negeri yang berasal dari Hermann. Peneliti berpendapat bahwa jenis perubahan yang dijelaskan Hermann ini menarik diperdalam. Hermann mengklasifikasikan empat tingkat perubahan kebijakan luar negeri yang menyertakan sejumlah indikator di dalamnya (Hermann, 1990:3-21):

a) *Adjustment Changes*. Perubahan terjadi di tingkat usaha (besar atau kecil) dan atau dalam skope penerimaan (seperti penyaringan dalam sasaran). Apa yang dilaksanakan, bagaimana dilaksanakan dan tujuan kebijakan

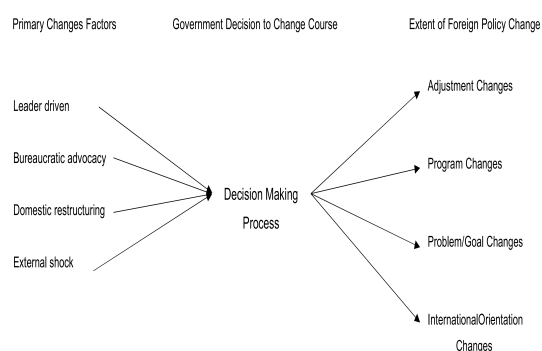
luar negeri yang dilaksanakan masih belum berubah.

- b) *Program Changes*. Perubahan dilakukan dalam metode atau cara-cara bagaimana tujuan dan masalah itu ditangani. Berbeda dengan *adjustment changes* yang sifatnya kuantitatif, *program changes* bersifat kualitatif dan melibatkan instrumen baru negara seperti melalui negosiasi diplomatik bukan kekuatan militer. Apa yang dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakan mengalami perubahan namun tujuan dari kebijakan luar negeri tidak berubah.
- c) *Problem/Goal Changes*. Masalah atau tujuan awal yang ditangani digantikan atau diubah. Dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, tujuannya diganti.
- d) *International Orientation Changes*. Perubahan kebijakan luar negeri paling ekstrem melibatkan perubahan arah seluruh orientasi aktor terhadap masalah dunia. Dibandingkan perubahan sebelumnya yang sifatnya kecil terhadap satu isu atau aktor tertentu, perubahan orientasi melibatkan perubahan mendasar peran dan aktivitas internasional. Tidak hanya satu kebijakan tetapi banyak perubahan yang simultan.

Dari konsep tingkat perubahan Hermann dapat dijelaskan bahwa perubahan paling rendah disebut sebagai *adjustment changes* dimana hanya terjadi pergeseran kebijakan dalam tingkat taktis.

Sedangkan perubahan besar terjadi dalam konsep international orientation changes dimana muncul perubahan ekstrem aktor negara terhadap dunia. Hermann juga menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pemicu perubahan seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1: Model Perubahan Kebijakan Luar Negeri Hermann



Sumber: Hermann (1990)

Hermann secara spesifik menyebut pemicu terjadinya perubahan yang juga memasukkan unsur domestik dan internasional dalam empat faktor. Pertama, *leader driven*. Kondisi ini biasanya terjadi di negara otoriter dimana pemimpin pemerintahannya sering memaksakan kehendaknya dalam arah dasar kebijakan luar negeri. Kedua, *bureaucratic advocacy*. Perubahan bisa saja terjadi dari sekelompok orang di dalam pemerintahan yang mengarahkan kebijakan luar negeri. Kelompok ini bisa saja berada di dalam sebuah lembaga atau menyebar di sejumlah institusi namun mereka berinteraksi secara berkala. Ketiga, *domestic restructuring*. Istilah ini merujuk kepada segmen masyarakat yang relevan yang mendukung sebuah rejim yang memerintah dan mungkin pula segmen masyarakat ini menjadi agen perubahan. Keempat, *external shock*. Pemicu ini merujuk kepada

sumber perubahan kebijakan luar negeri dari peristiwa internasional yang dramatis. Sebagian dari perubahan kebijakan luar negeri hasil dari persepsi pemimpin pemerintahan terhadap beberapa perubahan di lingkungan eksternal.

Salah satu unsur penting dalam model perubahan kebijakan luar negeri yang diajukan Hermann (1990) adalah adanya tujuh tahapan dalam perubahan kebijakan luar negeri. Konsep Hermann ini menarik karena dalam analisis dapat diketahui bagaimana tahapan perubahan kebijakan luar negeri berjalan.

- 1) *Initial policy expectations*. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri memasukkan ekspektasi unsur para pengambil kebijakan berkaitan dengan pengaruh yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan baru. Para pengambil kebijakan akan melakukan perubahan jika hasilnya memberikan hasil yang diharapkan. Namun jika terjadi perdebatan mengenai kebijakan apa yang akan diambil maka mereka akan mengurangi dampak negatif dari kebijakan baru.
- 2) *External actor/environmental stimuli*. Perubahan kebijakan pada umumnya muncul dari perubahan lingkungan yang tidak diharapkan yang memberikan rangsangan baru kepada kebijakan yang ada. Peristiwa internasional itu mungkin merupakan respons terhadap kebijakan yang ada atau sama sekali tidak terkait.
- 3) *Recognition of discrepant information*. Rangsangan eksternal

ini merupakan sinyal yang secara potensial menjadi umpan balik kepada pengambil kebijakan. Ketika perkembangan eksternal itu memunculkan informasi yang tidak konsisten dengan kebijakan yang diharapkan menjadi isyarat bagi pengambil kebijakan.

- 4) *Postulation of a connection between problem and policy.* Jika sebuah kebijakan akan berubah langkah kritisnya adalah identifikasi hubungan sebab akibat antara masalah dan kebijakan yang ada. Pengambil kebijakan harus memutuskan bahwa kebijakan pemerintahannya tidak efektif dengan masalah yang dihadapi, menjadikan masalah lebih buruk, memunculkan masalah baru yang lebih berat atau memberikan beban lebih berat.
- 5) *Development of alternatives.* Jika pengambil kebijakan tidak dapat menemukan cara untuk mengurangi masalah maka kebijakan baru akan ditempuh. Terdapat dua pendekatan besar, pertama, perubahan kebijakan untuk menangani masalah yang ada. Kedua, terjadinya perubahan dalam menafsirkan masalah.
- 6) *Building authoritative consensus for choice.* Konsensus dalam kebijakan luar negeri melibatkan lebih dari satu pengambil kebijakan. Perubahan kebijakan dapat belum dapat dilaksanakan jika tidak ada konsensus yang diambil.

- 7) *Implementation of new policy.* Keputusan tidak selesai hanya dengan pengambilan kebijakan baru. Proses implementasi kebijakan dapat mengubah kehendak yang seharusnya dilaksanakan. Oleh karena itu jika terdapat penentangan terhadap pilihan kebijakan yang diambil maka implementasinya akan sulit. Para pengambil kebijakan apakah sifatnya individual atau kelembagaan harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen yang rendah terhadap kebijakan baru akan menyulitkan implementasi kebijakan yang baru.

Ketujuh proses itu dipengaruhi agen perubahan yakni *leader driven, bureaucratic advocacy, domestic restructuring* dan *external shock*. Aspek pemimpin yang mengambil keputusan atas kebijakan baru karena pertimbangan politik kemudian birokrasi yang memberikan dukungan atas kebijakan pimpinan pemerintah merupakan elemen penting dalam perubahan kebijakan luar negeri. Selain itu adanya tekanan dalam negeri mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan luar negeri yang juga mempertimbangkan tekanan eksternal. Dengan pertimbangan itu maka aspek domestik dan internasional menjadi bahan masukan untuk adanya perubahan kebijakan luar negerinya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami individual atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan manusia (Creswell, 2014: 4).

Metode kualitatif ini memanfaatkan pendekatan studi kasus yang dapat memfokuskan kepada suatu fenomena sosial yang dalam kasus ini perubahan kebijakan luar negeri. Metode ini dipilih karena sebagai sebuah kebijakan yang mengalami perubahan para pelaku pengambil kebijakan memiliki pengalaman dan pendapat sendiri selama rentang waktu dua tahun. Dengan metode ini maka berbagai pandangan dan pendapat dari informan utama dan pendukung dapat dianalisis kembali dan dilakukan pendalaman melalui berbagai studi pustaka yang tersedia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Nuklir Iran

Untuk membahas bagaimana posisi Indonesia berubah dalam kebijakan terhadap program nuklir Iran berikut ini situasi dimana keputusan itu diambil ditinjau dari aspek internasional dan domestik ketika Resolusi 1747 diputuskan dan Indonesia beralih kebijakan terhadap isu nuklir Iran. Dengan mengetahui aspek internasional dan domestik ketika Indonesia yang tadinya mendukung Iran dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri terhadap isu nuklir Iran menghadapi dilema.

4.2 Faktor Internasional dalam Resolusi 1747 dan Resolusi 1803

4.2.1 Peran Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB di bawah kekuatan Amerika Serikat mengendalikan isu ini setelah sebelumnya menerima limpahan pengaduan dari IAEA pada tahun 2006. Kekhawatiran terhadap pengembangan senjata nuklir telah menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat menggunakan instrumen ini untuk menekan Iran melalui serangkaian resolusi (Tarock: 2006).

Krisis nuklir Iran ini semakin kuat ketika IAEA pada 24 September 2005 menyatakan Iran tidak mematuhi kewajibannya terhadap Safeguard Agreements NPT sehingga muncul ketidakpercayaan atas program nuklir Iran. Sikap tidak percaya IAEA terhadap niat Iran menjadikan nuklir sebagai energi yang bertujuan damai direspons oleh Dewan Keamanan PBB.

Kemudian 8 Februari 2006, Direktur Jenderal IAEA Mohammad El Baradei melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Iran tidak transparan dan diminta kerjasama dengan IAEA dalam mengelola nuklirnya. Merespons permintaan IAEA itu kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1696 yang isinya antara lain agar Iran bekerjasama dengan IAEA dan transparan. Dalam resolusi ini Iran diberi batas waktu sampai 31 Agustus 2006. Saat dikeluarkan resolusi pertama kali terhadap nuklir Iran ini, Indonesia belum menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia sedang dalam proses pemilihan dan baru memulai tugas sebagai anggota tidak tetap pada 1 Januari 2007.

Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1737 yang secara bulat dicapai lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap sebagai jawaban karena Iran tidak menjalankan Resolusi 1696. Resolusi ini menegaskan kembali ketentuan Resolusi 1696 yang mengharuskan Iran

menghentikan program pengayaan uranium dan kegiatan pemrosesan uranium serta mengambil kebijakan untuk membangun saling percaya. Sebagai tambahan dalam resolusi ini adalah kewajiban Iran menghentikan proyek reaktor air berat, meminta Iran meratifikasi Protokol Tambahan IAEA.

Tanggal 24 Maret 2007, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1747. Resolusi ini disahkan sebagai akibat Iran gagal memenuhi tuntutan dua resolusi sebelumnya. Resolusi 1747 meminta Iran mengambil kebijakan yang sesuai dengan Dewan Gubernur IAEA dan menggaris bawahi dalam Resolusi 1737 bahwa program nuklir dibolehkan sepanjang tujuannya untuk perdamaian. Resolusi ini mendorong Iran untuk mempertimbangkan usulan Juni 2006 untuk mencapai kesepakatan komprehensif jangka panjang bersaa P5+1.

Pada 3 Maret 2008, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1803 dengan 14 anggota setuju dan 1 yakni Indonesia abstain karena “remain[ed] to be convinced of the efficacy of adopting additional sanctions” terhadap Iran. Resolusi 1803 memuat sejumlah sanksi terhadap Iran selain menambah sanksi kepada individu dan lembaga yang terlibat program nuklir Iran. Negara yang merasa kedatangan mereka yang disebut terlibat dalam ambisi nuklir Iran dicegah masuk. Nama-nama yang dilarang bepergian ditambah juga pembekuan dana, aset finansial dan sumber daya ekonomi. Resolusi ini juga secara garis besar menjatuhkan sanksi kepada negara Iran dengan Broadening the scope of restrictions on the supply, sale, or transfer of nuclear and ballistic missile-related items to Iran established in Resolution 1737 and setting down new provisions to prevent Iran from developing its nuclear program.

Resolusi 1803 meminta semua negara waspada dalam melakukan komitmen-komitmen baru bagi masyarakat yang melakukan dukungan finansial dalam perdagangan dengan Irak terutama yang ada kaitan dengan rencana Iran mendapatkan senjata nuklir. Resolusi menyerukan semua negara waspada terhadap aktivitas finansial berbagai lembaga yang ada di wilayahnya dengan semua bank yang berada di Iran agar mencegah kegiatan program nuklir Iran. Selain itu Resolusi menyerukan semua negara memeriksa kargo yang masuk dan keluar dari Iran baik di dalam pesawat maupun kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Iran Air Cargo dan Perkapalan Iran jika ada kecurigaan terapat barang yang dilarang berdasarkan Resolusi 1737, 1747 atau 1803.

Resolusi yang terbaru pada tahun 2008 semakin memberikan tekanan kepada Iran bahkan resolusi ini sudah mengarah kepada sanksi sebagai negara. Dengan tekanan yang lebih berat itu Dewan Keamanan PBB menginginkan Iran menghentikan program nuklir yang mengarah kepada pembuatan senjata nuklir. Dalam perkembangannya sanksi yang disebutkan dalam Resolusi 1803 masih belum membuat Iran tunduk kepada tekanan Barat.

4.2.2 Isu Solidaritas Islam

Kondisi internasional ketika Indonesia mendukung sanksi terhadap Iran muncul di tengah sikap Iran yang tidak berdiam diri menghadapi tekanan internasional sejak tahun 2006 dengan melakukan pendekatan ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Beberapa negara berpenduduk Muslim mendukung program nuklir Iran (Kibaroglu: 2006).

Diplomasi Iran ke Indonesia memberikan dampak sikap Indonesia terhadap nuklir khususnya nuklir Iran tampak jelas ketika Presiden Iran

Mahmoud Ahmadinejad 10 Mei 2006. Presiden Yudhoyono mengatakan, “Saya percaya program nuklir untuk kepentingan damai yang dikembangkan oleh Iran itu. Dan, semua program yang berkaitan dengan nuklir itu dapat diselesaikan dengan baik.” (Media Indonesia, 1 Mei 2006) Pernyataan Yudhoyono itu yang juga didengar publik Indonesia menunjukkan bahwa adanya kepercayaan kepada Iran setidaknya sampai pada 2006 itu Indonesia percaya bahwa nuklir Iran ditujukan untuk perdamaian.

Pandangan Indonesia terhadap nuklir Iran ini juga muncul dari Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menyatakan dukungannya. Nur Wahid mengatakan bahwa Indonesia mendukung program nuklir Iran sejauh yang dikembangkan untuk kepentingan damai dan kemanusiaan (Media Indonesia, 3 Mei 2006). Kehadiran Presiden Iran di Indonesia itu dipandang oleh pengamat politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf sebagai isyarat agar Indonesia menjadi penengah dalam perselisihan antara Iran dan Barat dalam krisis nuklir. Pandangan Maswadi itu diperjelas lagi oleh peneliti LIPI Riza Sihbudi bahwa Indonesia harus mengambil peranan sebagai mediator untuk mencari solusi dari pertikaian antara Barat dan Iran dalam isu nuklir. (Media Indonesia, 5 Mei 2007).

Iran bahkan memanfaatkan forum Gerakan Non Blok dimana sebagian anggotanya negara berpenduduk Muslim untuk menggalang kekuatan opini. Iran memainkan diri sebagai pihak yang tertindas oleh Barat dalam soal penguasaan nuklir (Hobbs dan Moran, 2014: 15). Iran mengajukan argumen bahwa negara nuklir bisa bertindak sewenang-wenang melarang negara baru yang akan menguasai nuklir. Iran menegaskan setiap negara memiliki hak mengembangkan teknologi nuklir.

4.2.3 Tekanan Barat

Dalam rancangan Resolusi 1747, Indonesia mengusulkan sejumlah amandemen terhadap draft yang diajukan P-5+1. Dalam proposal itu anggota tetap PBB menekankan perlunya kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir namun Indonesia berpendapat bahwa tidak semata-mata mencantumkan soal Iran saja (Jenie: 2018). Amandemen usulan Indonesia ini mendorong adanya konsistensi terhadap sikap dunia karena pada kenyataannya Israel sudah menjadi negara nuklir yang tidak mendeklarasikan diri.

Sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga pada tahun 2007 memberikan pandangan bahwa dalam resolusi yang akan dikeluarkan perlu pula penegasan bahwa semua pihak yang terikat kepada NPT mendapatkan hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Indonesia memiliki pandangan dalam pengukuhan resolusi ini bahwa yang perundingan yang melibatkan isu nuklir Iran harusnya didasari oleh niat baik yang disepakati oleh semua pihak. Upaya Indonesia juga dilakukan melalui pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad untuk mencari solusi yang tepat. Yudhoyono mengatakan amandemen yang diusulkan Indonesia ini diterima yang kemudian memberikan sikap Indonesia untuk mendukung resolusi 1747.

Sejumlah informasi menyebutkan adanya percakapan telepon antara Presiden George Bush dengan Presiden SBY disebut sebagai faktor menentukan dari sikap Indonesia yang semula keberatan dengan sanksi baru itu menjadi mendukung sanksi (Gindarsah: 2017 dan Basyar: 2018). Bahkan tidak hanya Indonesia yang menjadi sasaran dari tekanan Amerika Serikat tetapi juga Afrika dan Selatan.

Dalam beberapa sumber disebutkan tidak hanya Presiden Bush juga Menlu Condoleezza Rice aktif mendekati Indonesia. Qatar, dan Afrika Selatan untuk menggolkan kebijakan Amerika Serikat.

Informasi mengenai tekanan Amerika Serikat ini tidak hanya diperoleh dari informan wawancara tetapi juga seperti dimuat di dalam mingguan Mesir Alhram 29 Maret-4 April 2007. Berdasarkan laporan mingguan ini yang mengutip wartawannya Khaled Dawoud di markas PBB New York yang mengatakan 48 jam sebelum pemungutan suara terhadap resolusi 1747, Wakil Tetap Afsel yang juga Presiden Dewan Keamanan PBB waktu itu Dumisani Kumalo, mengajukan teks amandemen setebal tiga halaman yang gagal disetujui anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan juga Jerman.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa penolakan amandemen itu yang tampaknya juga disetujui Indonesia ditolak sehingga sanksi tambahan akan dijatuhkan terhadap Iran. Kumalo dilaporkan kecewa dan secara terbuka menyatakan telah dikhianati oleh negara pengusul resolusi yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia, RRC dan Jerman.

Dalam perkembangan menjelang pemungutan suara seperti disebutkan Al Ahram, dua anggota tidak tetap yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia dan Qatar juga mendukung sikap Afrika Selatan agar terjadi perundingan politik bukan sanksi lebih keras terhadap Iran. Indonesia dan Qatar disebutkan ingin resolusi yang mengaitkan sikap PBB terhadap Iran dengan kawasan bebas nuklir Timur Tengah (Antara, 3 April 2007).

Diplomasi Indonesia dan dua negara lainnya untuk membuat resolusi tidak hanya menekan Iran tetapi juga mengaitkan sanksi dengan penciptaan zona bebas nuklir di Timur Tengah diadopsi sebagian oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu alasan mengapa akhirnya Indonesia setuju

adalah karena dalam resolusi tersebut disebutkan "*a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to global non-proliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including their means of delivery*" (Basyar: 2010).

Dalam resolusi ini tidak ada rujukan langsung kepada Israel, sesuatu yang ditolak oleh Amerika Serikat sejak awal. Masuknya gagasan mengaitkan sanksi Iran dengan pencegahan nuklir di Timur Tengah yang tidak lain diarahkan kepada Israel telah membuat tiga negara yang menginginkan amandemen terhadap resolusi usulan Amerika Serikat dan sekutunya telah melunak (Jenie: 2018, Wirajuda: 2007).

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa Indonesia tidak melakukan konfrontasi dengan Barat dalam pidato pengesahan resolusi atau mengkritik Amerika Serikat dan Barat karena untuk resolusi ketiga dijatuhkan meski dua resolusi sebelumnya belum terselesaikan. Indonesia juga tidak memberikan komentar mengapa selama delapan bulan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan tiga resolusi dengan isinya sanksi terhadap pemerintah dan individu yang semakin berat. Namun tidak eksplisit mengatakan bahwa Israel yang sudah diyakini memiliki senjata nuklir tidak diperlakukan sama oleh Dewan Keamanan PBB. Alasan yang tidak begitu jelas dalam posisinya di Dewan Keamanan PBB inilah yang menimbulkan kekecewaan di dalam negeri karena Indonesia berubah haluan dari mendukung menjadi menentang program nuklir Iran.

4.3 Faktor Domestik dalam Resolusi 1747 dan Resolusi 1803

4.3.1 Ormas Keagamaan

Dari beberapa ulasan di situs NU Online misalnya tampak bahwa ormas ini menggambarkan Iran sedang berhadapan dengan kekuatan Barat dalam pengembangan senjata nuklir. Tema perlawanan negara Muslim Iran melawan Barat khususnya negara besar Amerika Serikat menjadi bagian kerangka memandang isu nuklir Iran.

Sikap Iran yang meyakinkan dunia bahwa nuklirnya untuk tujuan damai disampaikan Dubes Iran Behrooz Kamalvandi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di yang diterima di kantornya di Jakarta 5 Januari 2007. Dalam pertemuannya, Dubes Iran Behrooz Kamalvandi menjelaskan bahwa pengayaan uraniumnya—seperti yang dipersoalkan Amerika Serikat (AS) melalui Dewan Keamanan PBB—tidak untuk senjata (nu.or.id, 5 Januari 2007).

Sikap NU ini sebagian tercermin dari dimuatnya berita mengenai sikap Iran dalam pengembangan nuklir pada tahun 2006. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam kunjungannya ke kantor PBNU 12 Mei 2006 kembali menegaskan sikap negaranya untuk terus kembangkan program nuklirnya. “Negara kami memiliki hak penuh untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Seluruh kegiatan nuklir kami sudah sesuai dengan instruksi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA),” ungkap Ahmadinejad (nu.or.id, 12 Mei 2006).

Selain NU, ormas keagamaan Muhammadiyah juga memiliki pandangan sendiri terhadap isu nuklir Iran. Muhammadiyah berhati-hati untuk memberikan penilaian atas nuklir Iran. Hal ini tampak misalnya ketika kunjungan Ahmadinejad ke kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta 12 Mei 2006. Ahmadinejad diterima Ketua Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Sudibyo Markus. Pada akhir pertemuan Sudibyo dikutip media mengatakan, “Kita bertemu dan membicarakan tentang persoalan dunia Islam secara umum dan juga membicarakan kerjasama antara lain di bidang pendidikan. Kita tidak bicara tentang nuklir karena sudah disampaikan kepada Presiden SBY” kata Sudibyo (Detikcom, 12 Mei 2006). Pernyataan ini secara implisit mengikuti sikap Indonesia yang mendukung pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Indonesia yang menerima kunjungan Ahmadinejad tahun 2006 mendukung pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai, bukan untuk senjata.

Namun setelah Indonesia mengambil sikap mendukung kebijakan menjatukan sanksi baru lebih berat terhadap Iran agar program nuklirnya dihentikan atau diperiksa oleh IAEA, sebagian ormas memandang pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan persepsi domestik. Nahdhatul Ulama termasuk yang cukup keras memberikan reaksi terhadap kebijakan Indonesia yang pro sanksi baru terhadap Iran.

Secara resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. PBNU menilai, sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang justru akan mempersulit posisi Indonesia sendiri.”Sikap Indonesia yang ikut menyetujui sanksi terhadap Iran adalah blunder besar untuk pemerintah Indonesia,” ungkap Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi di Jakarta (nu.or.id, 26 Maret 2007).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan penyesalan yang mendalam atas sanksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB untuk negara yang dipimpin oleh Ahmadinejad itu. Menurut

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengembangkan teknologi nuklir adalah hak Iran. Din Syamsuddin juga mengatakan, sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, seharusnya Indonesia berempati pada Iran. Muhammadiyah memandang bahwa sanksi itu bentuk ketidakadilan terhadap Iran.

Oleh karena itulah Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia berhati-hati, jangan sampai posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB hanya untuk menjalankan skenario dari negara adikuasa untuk mencaplok Iran. Sikap Muhammadiyah ini disampaikan ketika menerima Duta Besar Iran Behrooz Kamalvandi di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, 27 Maret 2007 (Detikcom, 27 Maret 2007).

Sementara itu Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nanat Fatah Natsirusai menanggapi kebijakan Indonesia dalam isu nuklir Iran dengan mengatakan, seharusnya Indonesia abstain bukannya mendukung Resolusi 1747 (Detikcom, 28 Maret 2007). ICMI meminta penjelasan kepada pemerintah soal sikap yang diambilnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian ICMI mengaitkan sikap Indonesia yang tidak mencerminkan bangsa Indonesia dan sebagai negara Non Blok padahal duduk di Dewan Keamanan PBB karena anggota Gerakan Non Blok.

4.3.2 Partai Politik

Partai politik yang duduk di lembaga legislatif memiliki kekuasaan mengawasi kebijakan yang diambil lembaga eksekutif termasuk dalam urusan luar negeri. Peran partai politik di legislatif ini dikukuhkan antara lain dalam perundangan. Misalnya ada peran dalam pengangkatan duta besar, pemerintah akan meminta pertimbangan DPR seperti termuat dalam UUD 1945 dan

juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Demikian juga ketika kebijakan Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun 2007 diambil saat itu para pemimpin partai politik di DPR mengambil sikap mendukung kebijakan pengembangan nuklir Iran. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan pemimpin DPR berkaitan dengan nuklir Iran. Tokoh Golkar dan juga Ketua DPR Agung Laksono tanggal 15 Februari 2007 mengatakan parlemen Indonesia mendukung Iran dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (tempo.co, 15 Februari 2007).

Pernyataan itu dikeluarkan setelah dua kali sanksi dijatuhkan kepada Iran dan ketika bulan Januari 2007 Indonesia memulai posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai Ketua DPR pernyataan Agung ini memberikan kesan kepada berbagai partai politik bahwa posisi Indonesia dalam isu nuklir menghendaki jalan diplomasi bukan menekan Iran melalui Dewan Keamanan PBB.

Anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Permadi, dalam Rapat Kerja dengan Departemen Luar Negeri di Gedung DPR RI, Senayan, 29 Maret 2007 melontarkan kritik terhadap pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB dalam isu nuklir Iran (detikcom, 30 Maret 2007). Permadi menilai sikap Indonesia sebagai sesuatu yang tidak memiliki pendirian. Bahkan Permadi curiga bahwa isu nuklir untuk menekan Iran ini adalah alasan Amerika Serikat untuk menggempur Iran karena saat itu sudah banyak kapal perang mendekat ke Iran. Permadi juga menambahkan bahwa sikap Indonesia mendukung Resolusi 1747 membuat rakyat Indonesia tidak senang.

Meskipun Partai Keadilan Sejahtera termasuk dalam koalisi pemerintahan SBY

namun dalam hal isu nuklir Iran ini menyebut pemerintah Indonesia plin plan. Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring 23 Maret 2007, Indonesia pada awalnya mendukung penggunaan nuklir Iran untuk tujuan damai namun sekarang menyetujui sanksi saat dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB (detikcom, 26 Maret 2007). Seharusnya, menurut Tifatul, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia menjadi pengimbang dan jangan ikut-kutan negara besar lainnya. Tifatul juga menambahkan bahwa seharusnya tidak ada standar ganda dalam pemilikan nuklir karena pada faktanya Amerika Serikat memiliki ribuan hulu ledak nuklir yang tidak dilarang PBB.

Abdillah Toha dari Partai Amanat Nasional dalam program Today's Dialog di Metro TV 2 April 2007 menyatakan pemerintah seharusnya menjadi penyampai referensi yang menyalurkan aspirasi harapan rakyat yang sebagian menentang resolusi 1747. Menurut Abdillah, publik berharap putusan di dalam kebijakan luar negeri mempertimbangkan kaitan dengan sesama negara Muslim dengan Iran, persamaan sebagai anggota Gerakan Non Blok dan Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam maupun hubungan bilateral yang belakangan dekat dengan kunjungan Presiden Ahmadinejad ke Indonesia tahun 2006. Bahkan saat itu pemerintah Indonesia mendukung program nuklir Iran meskipun sudah ada sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Salah satu penggagas interpelasi, Effendy Choirie (2019) membenarkan bahwa alasan DPR mengajukan protes terhadap pemerintah atas sikapnya dalam Resolusi 1747 karena tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Apalagi tekanan Amerika Serikat kepada Iran itu dianggap sebagai upaya untuk mencegah negara yang mayoritas Muslim itu menguasai teknologi nuklir. Jadi kalau

sanksi itu didukung sama dengan membiarkan negara berkembang seperti Iran dihalangi dalam memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Hajriyanto Y Thohari mengingatkan kepada Pemerintah RI agar jangan lagi mendukung resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan kepada Iran. Hajriyanto Thohari menambahkan, dapat dipastikan, resolusi baru ini pun akan efektif dalam hal sanksi tersebut (Merdeka.com, 28 Februari 2007).

Puncak respons kalangan partai politik ini adalah mengajukan Hak Interpelasi kepada pemerintah agar Presiden Yudhoyono langsung memberikan penjelasan mengapa sikapnya mendukung Resolusi 1747. Penyampaian interpelasi dilakukan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto, anggota Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, Happy Bone Zulkarnaen, Hajriyanto Thohari, anggota Partai Amanat Nasional Abdillah Toha dan Ali Mochtar Ngabalin dan Ryass Rasyid dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (hukumonline.com). Kemudian Ketua DPR Agung Laksono menyatakan dukungan mengajukan interpelasi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengapa Indonesia mendukung sanksi melalui Resolusi 1747. Fraksi yang tidak ikut dalam pengajuan interpelasi adalah Fraksi Partai Demokrat dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berasal.

Pengajuan hak interpelasi ini dipandang sebagai salah satu instrumen politik yang menunjukkan kekuatan politik di DPR tidak menyetujui langkah pemerintah. Dengan interpelasi ini juga memperlihatkan bahwa isu nuklir Iran telah merambah pentas politik domestik. Partai yang tidak ikut memerintah berusaha mendorong agar Presiden datang ke DPR

menjelaskan sanksi Resolusi 1747 yang diambil pemerintah bulan Maret 2007.

4.3.3 Peran Media Massa

Media massa di Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu nuklir Iran baik dalam konteks kawasan Timur Tengah maupun dalam konteks politik internasional (Suryopratomo: 2019). Dalam konteks Timur Tengah media menggambarkan bahwa nuklir Iran dapat menjadi katalis perubahan dalam mengimbangi nuklir yang dimiliki Israel meskipun tidak diumumkan ke dunia.

Selain dalam konteks Timur Tengah, media massa menggambarkan berita internasional soal nuklir Iran mengangkat sisi positif terhadap pengayaan uranium yang dilakukan negara itu. Harian Kompas misalnya menyoroti tidak akuratnya data mengenai pengembangan nuklir Iran yang cenderung menyudutkan Iran. Kompas juga menggambarkan dampak buruk respons berlebihan terhadap pengembangan nuklir Iran sehingga tahun 2006 perlu dikeluarkan resolusi yang menekan Iran. Bahkan Kompas menggambarkan resolusi Dewan Keamanan PBB itu sebagai bentuk ketidakberdayaan masyarakat internasional menghadapi tekanan negara-negara adidaya (Kompas, 19 Februari 2007).

Selain Kompas, Media Indonesia juga aktif memberitakan isu nuklir Iran ini. Koran ini juga relatif menggambarkan secara positif mengenai posisi Iran misalnya ketika Indonesia abstain dalam sidang darurat IAEA di Wina memuat reaksi dari DPR yang menyesalkan abstainnya Indonesia (Media Indonesia, 16 Februari 2006). Sikap Indonesia itu menunjukkan Indonesia tidak setuju penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Pemuatan berita itu memberikan ruang positif terhadap media dalam menyikapi pengembangan nuklir Iran. Jawa Pos juga memberikan perhatian kepada isu nuklir

dimana pada tahun 2006 memberitakan 96 item mengenai isu nuklir Iran. Demikian juga tahun 2007 menunjukkan perhatian kepada nuklir Iran dengan 84 berita.

Dari beberapa contoh mengenai berita dan opini media massa menjelang pemungutan suara pada bulan Maret 2007 ketika Indonesia sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tampak media di Indonesia tidak memberikan citra buruk terhadap Iran. Ini menunjukkan bahwa posisi media massa saat itu dari sudut pemberitaan atau pemuatan opininya memperlihatkan aspek positif dari pengembangan nuklir Iran dan aspek negatif tekanan Barat terhadap Iran.

Dari semula sikap pasif yang hanya memuat berita, analisis dan opini, media massa Indonesia menunjukkan perannya dalam menyalurkan kepentingan publik. Tidak hanya itu, Kompas misalnya melakukan jajak pendapat untuk mengetahui apa pendapat publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu nuklir Iran ini.

Mengenai sikap media ini, menarik apa yang dijelaskan oleh Gindarsah (2012) bahwa media massa seperti Kompas perlu mengadakan jajak pendapat mengenai kebijakan Indonesia mendukung Resolusi 1747. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden (50,4 %) menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Namun demikian mereka yang tidak puas terkait erat dengan afiliasi Partai Demokrat (yang memerintah), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Lebih rinci lagi jajak pendapat ini menunjukkan bahwa 33,2 % responden setuju untuk menentang Resolusi 1747 sedangkan 26,7 % memilih untuk abstain dalam menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

Kesimpulan lain dari jajak pendapat Kompas ini menunjukkan bahwa 62,6 % responden ragu-ragu bahwa diplomasi pemerintah mampu berdiri sederajat dengan negara-negara besar. Dalam kaitan ini tentu ada hubungan dengan peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB dimana lima negara besar yakni Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China dan Rusia memiliki hak veto. Sedangkan Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap selama dua tahun.

Informasi yang menarik dan menjadi perhatian publik termasuk kalangan politisi partai adalah bahwa sebagian besar responden (73,2%) berpendapat keputusan Indonesia itu mendukung Resolusi 1747 tidak lepas dari tekanan negara besar. Namun demikian dalam jajak pendapat juga terungkap bahwa 63,2 % responden mengetahui dilema yang dihadapi Indonesia jika menentang kepentingan negara besar terutama Amerika Serikat.

Makna jajak pendapat dari Kompas menunjukkan besarnya perhatian media massa atas langkah yang diambil Indonesia di Dewan Keamanan PBB (Suryoprato, 2019). Pendapat yang muncul dari opini publik juga tidak jauh beda dengan pendapat publik adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Media berperan juga menyampaikan peta opini masyarakat yang secara langsung atau tidak akan menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam kebijakan luar negeri.

Dari analisis faktor internasional dan domestik di atas yang menjadi latar belakang adanya perubahan kebijakan luar negeri dari mendukung sanksi menjadi bersikap abstain di Dewan Keamanan PBB maka dapat dijelaskan bahwa tekanan domestik menjadi penentu dibandingkan faktor internasional. Jika tahun 2007 tekanan Barat begitu kuat sehingga Indonesia yang semula memiliki kebijakan

mendukung pengembangan nuklir namun dihadapkan pada politik di Dewan Keamanan PBB maka berubah haluan menjadi mendukung. Meskipun peristiwa ini hanya pengambilan keputusan dalam Resolusi 1747 dan jauh dari pantauan publik, namun ternyata dampak kebijakan yang mendukung sanksi baru terhadap Iran ini menimbulkan reaksi di tingkat domestik baik dari ormas keagamaan, tokoh masyarakat, partai politik dan juga media massa yang meliputnya.

Seberapa jauh perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan terhadap isu nuklir Iran ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB

	Resolusi 1747 Dukung Sanksi terhadap Iran	Resolusi 1803 Abstain dalam mendukung sanksi terhadap Iran	Adjustment dalam Kebijakan Luar Negeri
Faktor Domestik	Ormas, tokoh masyarakat dan anggota DPR mengetahui bahwa Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Masyarakat semula tidak paham isu nuklir Iran ini di Dewan Keamanan PBB.	Tekanan domestik dari para politisi, tokoh masyarakat dan ormas menuntut agar dukungan terhadap sanksi ke Iran di cabut. Aksi protes domestik ini membuat pemerintah memperhatikan aspirasi publik	Kebijakan luar negeri Indonesia memperhatikan protes dan tekanan dari masyarakat dan anggota DPR. Kebijakan yang semula mendukung sanksi terhadap Iran menjadi abstain dalam pemungutan suara di DK PBB.
Faktor Internasional	Indonesia memandang adanya aspek tidak transparan dari Iran soal pengembangan nuklir. Indonesia mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendukung sanksi terhadap Iran.	Indonesia melihat tidak perlu lagi sanksi baru karena Iran sudah mulai transparan.	Isu nuklir Iran ini menjadi perhatian utama Amerika Serikat dan sekutunya. Indonesia tidak berkonfrontasi dengan AS sehingga mengambil sikap abstain, tidak menentang resolusi yang menambah sanksi terhadap Iran

Tabel 2 tersebut menunjukkan mengenai perubahan yang terjadi dalam kebijakan Indonesia dalam isu nuklir Iran dari faktor internasional dan domestik.

Demikian juga kebijakan luar negeri seperti apa yang dilakukan Indonesia untuk dalam menghadapi isu nuklir Iran yang disebut sebagai kebijakan luar negeri yang sifatnya penyesuaian.

Kalau dikaji lebih mendalam, maka dari empat kategori perubahan menurut konsep Hermann yakni empat tingkat perubahan yakni *adjustment changes*, *program changes*, *problem/goal changes* dan *international orientation changes*. Merujuk kepada pengertian empat tingkat perubahan kebijakan luar negeri tersebut tampak bahwa dalam kasus nuklir Iran ini di Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengambil kebijakan yang sifatnya *adjustment changes*.

Kebijakan luar negeri terkait nuklir Iran tidak sampai mengubah tujuan atau bahkan orientasi kebijakan luar negeri yang sifatnya drastis. Sejumlah ciri dari *adjustment changes* menurut Hermann adalah perubahan usaha, penyesuaian dalam respons, pelaksanaan, proses pelaksanaan dan tujuan kebijakan tidak berubah. Jadi perubahan kebijakan luar negeri pada tahap ini merupakan sebuah penyesuaian saja tanpa melakukan perubahan mendasar dan besar.

Ciri-ciri yang disebut Hermann sebagai *adjustment changes* itu ada dalam perubahan kebijakan Indonesia yang menyesuaikan diri tanpa mengubah kebijakan secara drastis dari pro sanksi menjadi menentang sanksi. Indonesia menyesuaikan diri dengan mengambil kebijakan abstain dari mendukung sanksi karena semula menganggap Iran tidak transparan karena terpengaruh oleh pendapat IAEA dan juga adanya pendekatan dan tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia agar resolusi diputuskan dengan suara bulat.

Namun dalam konteks konsep yang disebut *adjustment changes* itu tidak memuat ciri perubahan itu karena faktor

domestik seperti mengurangi krisis politik atau meredakan ketegangan politik di dalam negeri atau meredakan tekanan dari luar negeri. Meskipun dapat dianggap sebagai cara meringankan tekanan dari dalam negeri namun tidak serta merta diakui pemerintah.

Perubahan kebijakan yang diambil Indonesia dalam kasus nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB dapat disebut sebagai sebuah taktis saja bukan sesuatu yang mendasar. Namun pemerintah tidak mau kebijakan yang disebut pragmatis ini sebagai akibat tekanan dari dalam negeri. “Kita sejak awal memandang bahwa ini adalah masalah teknis, bukan masalah politis. Kita selama ini tidak mau agar masalah ini dipolitisasi karena memang masalah ini sarat dengan potensi untuk dipolitisasi,” ujar Dino dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan Jakarta. (Okezone.com. diakses Oktober 2018)

Bahkan Presiden Yudhoyono menyatakan, abstainnya Indonesia dalam pengambilan voting resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai program nuklir Iran adalah keputusan yang berdiri sendiri dan dilakukan secara independen dan tidak ada kaitannya dengan tekanan siapa pun atau kepentingan apa pun (Okezone.com. diakses Oktober 2018).

Dalam hal ini, kebijakan yang mendukung sanksi terhadap Iran telah menimbulkan kegaduhan politik yang menyita waktu pemerintahan sampai kemudian terjadi interpelasi DPR dimana seharusnya presiden menjelaskan kepada DPR mengapa mendukung sanksi baru dalam Resolusi 1747 bulan Maret 2007. Namun karena pertimbangan lain, Presiden Yudhoyono hanya mengabaikan sebagian permintaan DPR dengan hanya mengirim Menlu Hassan Wirajuda untuk menjelaskan kebijakan Indonesia terhadap isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB.

Konsep *adjustment changes* dari Hermann tidak mengakomodasi perubahan yang dialami dalam kebijakan luar negeri terhadap nuklir Iran 2007-2008. Oleh sebab itulah mengapa perlu ada tambahan secara konseptual yakni memasukkan ciri lain dalam *adjustment changes* ini yakni untuk meredakan ketegangan politik di dalam negeri akibat kebijakan luar negeri atau meredakan tekanan dari dalam negeri yang bersifat politik baik dari kalangan ormas, tokoh masyarakat, media dan partai politik.

Secara bersamaan menempuh kebijakan *abstain* di Dewan Keamanan PBB ini juga dapat menghindari konfrontasi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang menginginkan tekanannya terhadap Iran tidak terhambat. Sikap *abstain* ini tidak akan menjadikan resolusi tidak terlaksana karena kebijakan yang ditempuh Indonesia. Kebijakan untuk *abstain* ini akan memberikan pesan kepada Barat tidak melakukan penentangan terbuka terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya yang sedang dalam upaya secara konsisten selama tiga tahun menekan Iran. Jika Indonesia mengambil sikap menentang resolusi maka pada Resolusi 1803 akan tampak bahwa pemerintahan Yudhoyono mengambil kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan Barat. Meskipun hanya dalam satu isu nuklir Iran namun karena pentingnya isu nuklir Iran ini dipandangan Barat, maka kebijakan menentang Resolusi 1803 akan menimbulkan masalah dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Berdasarkan pada kebijakan Indonesia yang bersikap *adjustment* ini dapat dirangkum bahwa konsep Hermann ini dapat diperkaya dengan tidak hanya karakter mengubah program hanya penyesuaian tetapi juga adanya faktor pengambil kebijakan luar negeri meredakan ketegangan di dalam negeri

karena menjadi sebuah tekanan kepada pemerintahan.

Pada saat bersamaan muncul penyesuaian eksternal dimana pemerintah yang menempuh kebijakan *adjustment changes* ini berhadapan dengan kepentingan eksternal terutama negara-negara besar. Dengan mengambil sikap penyesuaian ini maka tidak akan terjadi konfrontasi dengan kepentingan negara-negara besar terutama dalam isu-isu strategis seperti masalah program nuklir Iran.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri terkait nuklir Iran dan faktor internasional serta domestik seperti apa yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu nuklir Iran 2007-2008 khususnya di Dewan Keamanan PBB. Dengan menggunakan konsep Hermann (1990) dikombinasikan dengan konsep dari Gustavsson (1999), Holsti (1982) dan Rosenau (1976) serta pilihan faktor yang dianggap berpengaruh oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

Perubahan kebijakan luar negeri terhadap isu nuklir Iran tahun 2007-2008 disebabkan karena adanya pertimbangan pemerintah Indonesia yang tidak sejalan dengan konsistensi Indonesia terhadap kebijakan dalam pengembangan nuklir. Indonesia memiliki kebijakan yang konsisten dalam pengembangan nuklir yang diperbolehkan dalam traktat NPT. Tahun 2006 Indonesia menyatakan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai, namun dalam Resolusi 1747 Indonesia memperlihatkan dukungan kepada resolusi yang memberikan sanksi terhadap Iran

karena mengembangkan nuklir. Ini merupakan perubahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa Indonesia seharusnya mendukung program pengembangan nuklir Iran.

Akibat dari tidak konsisten terhadap kebijakan pengembangan nuklir ini dalam kasus nuklir Iran maka muncul reaksi dari domestik yang mempertanyakan mengapa Indonesia tidak mengikuti kebijakan sebelumnya yang mendukung program nuklir Iran dan tidak mengikuti kebijakan Barat yang ingin menghentikan program nuklir Iran. Tekanan dari domestik yang mendesak Indonesia mengikuti kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan bebas dari tekanan Barat yang kemudian melahirkan kebijakan baru untuk abstain dalam Resolusi 1803 tahun 2008 ketika Indonesia menjadi anggota tidak Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Iran karena masih mengembangkan nuklirnya. Saat itu Indonesia memberikan sejumlah alasan yang dapat diterima oleh 14 anggota lain Dewan Keamanan PBB

Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu nuklir Iran ini dikaitkan dengan konsep Hermann (1990) merupakan bagian dari adjustment changes, perubahan yang sifatnya penyesuaian, bukan perubahan yang drastis dan radikal. Adjustment changes yang dalam konsep Hermann menekankan kepada beberapa indikator seperti perubahan usaha, penyesuaian dalam respons pelaksanaan, proses dan tujuan kebijakan tidak berubah.

Indikator-indikator itu memang terjadi dalam perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB. Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan luar negeri yang menunjukkan bahwa faktor internasional yang semula sangat mempengaruhi

keputusan Indonesia kini dihadapkan dengan faktor-faktor domestik. Di dalam negeri, publik dan juga kalangan partai politik mempersepsikan bahwa tekanan kepada Iran untuk menghentikan program nuklir sebagai sebuah tindakan yang tidak adil. Sebagian publik Indonesia menilai Amerika Serikat dan sekutunya memberlakukan standar ganda karena Israel tidak diberlakukan sama meskipun sudah ada keyakinan bahwa Israel malah sudah memiliki hulu ledak nuklir yang dilarang oleh dunia.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Alden, Chris and Amnon Aran. 2017. *Foreign Policy Analysis: New Approaches*. London: Routledge.
- Alles, Delphine. 2016. *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the State*. London: Routledge.
- Boeije, Hennie. 2010. *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.
- Bowen, Wyn Q. and Jonathan Brewer. *Iran's Nuclear Challenge: Nine Years and Counting*. *International Affairs* 87:4 (2011) 923–943
- Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Plagrave Macmillan.
- Buckley, B.1998. *The News Media and Foreign Policy: An Exploration*. Halifax, NS: Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University.

- Clarke, Michael and Brian Whites (eds) 1995. *Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach*. Hants: Edward Elgar Publishing Limited.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Hein, G.R., 1986. *Soeharto's Foreign Policy: Second-Generation Nationalism in Indonesia*. Berkeley: University of California.
- Hermann, Charles F., Charles W. Kegley Jr., James N. Rosenau. 1987. *New Directions in the Study of Foreign Policy*. London: HarperCollins Academic.
- Hitchcock, Mark. 2007. *The Apocalypse of Ahmadinejad: The Revelation of Iran's Nuclear Prophet*. Colorado: Multnomah Books.
- Hill, Christopher. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. New York: Palgrave.
- Hobbs, Christopher and Matthew Moran. 2014. *Exploring Regional Responses to a Nuclear Iran: Nuclear Dominoes?* Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Holsti, K.J., Miguel Monterichard, Ibrahim Msabaha, Thomas W. Robinson, Timothy Shaw and Jacques Zylbererg. 1982. *Why Nations Realign*. London: Routledge.
- Hudson, Valerie M. 2014. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Inayati, Ratna Shofi. 2005. *Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Kebijakan luar negeri Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Jafarzadeh, Alireza. 2007. *The Iran Threat: President Ahmadinejad and the Coming Nuclear Crisis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Khan, Saira. 2010. *Iran and Nuclear Weapons Protracted Conflict and Proliferation*. London: Routledge.
- Kumar, R. 1997. *Non-Alignment Policy of Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Klotz, Audie and Deepa Prakash (Eds). 2008. *Qualitative Methods in International Relations A Pluralist Guide*. New York: Palgrave MacMillan.
- Lamont, Christopher. 2015. *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Luck, Edward C. 2007. *UN Security Council Practice and Promise*. New York: Routledge.
- Maxwell, Joseph A. 2005. *Qualitative Research Design: An Interpretative Approach*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Naji, Kasra. 2008. *Ahmadinejad: The Secret History of Iran's Radical Leader*. Berkeley: University of California Press.
- Neack, Laura and Jeanne A.K. Hey and Patrick J. Hanye. 1995. *Foreign Policy Analysis: Continuity and*

- Change in Its Second Generation. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Narang, Neil, Erik Gartzke and Mathew Kroenig. 2016. *Nonproliferation Policy and Nuclear Posture*. New York: Routledge.
- Onderco, Michal. 2015. *Iran's Nuclear Program and the Global South: The Foreign Policy of India, Brazil, and South Africa*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Rezaei, Farhad. 2017. *Iran's Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Rosenau, James N. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Rosenau, James N., Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Serfaty, Simon. 1990. *The Media and Foreign Policy*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Sen, K. and Hill, D.T., 2006. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. New York: Equinox Publishing.
- Thakur, Ramesh. 2015. *Nuclear Weapons and International Security*. London: Routledge.
- Walker, Stephen G., Akan Malici and Mark Schafer. 2011. *Rethinking Foreign Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Warnaar, Maaïke. 2013. *Iranian Foreign Policy during Ahamdinejad: Ideology and Actions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wilson, Gary. 2010. *The United Nations and Collective Security*. London: Routledge.
- Wuryandari, G. 2008. *Kebijakan luar negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Acuan artikel dalam buku:**
- Brody, Richard. 1994. "Crisis, War and Publik Opinion: The Media and Publik for the President". In W. Lance Bennet and David Paletz eds., *Taken by Storm, Publik Opinion and U.S. Foreign Policy in the Gulf War*. Chicago: University of Chicago press.
- Fitriani, Evi. 2015. "Yudhoyono's foreign policy: is Indonesia a rising power?" Dalam *the Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* Edited: Edward Aspinall, Marcus Mietzner and Dirk Tomsa. Singapore: ISEAS.
- Gilinsky, Viktor. 2004. "Iran's "Legal" Paths to the Bomb". *Checking Iran's Nuclear Ambitions*. Edited Henry Sokolski dan Patrick Clawson. Carlisle: Strategic Studies Institute (SSI).
- Holsti, K.J. 1982. "Restructuring Foreign Policy: A Neglected Phenomenon in Foreign Policy Theory". Dalam *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*. Edited by K.J. Holsti. London: Allen and Unwin.
- Kroenig, Matthew. 2016. "Force or Friendship? Explaining Great Power Nonproliferation Policy". Dalam Narang, Neil, Erik Gartzke and Matthew Kroenig. *Nonproliferation Policy and Nuclear Posture: Cause and Consequences for the Spread of*

- Nuclear Weapons*. New York: Routledge.
- Moran, Andrew. 2015. "Nuclear Proliferation". Dalam Hough, Peter, Shahin Malik, Andrew Moran dan Bruce Pilbeam. *International Security Studies: Theory and Practice*. Lond: Routledge.
- Kibaroglu, Mustafa. 2006. "Good for Shah, Banned for Mullahs: The West and Iran's Quest for Nuclear Power". *Middle East Journal*. Volume 60. No2. Spring 2006.
- O'Hefernan, Patrick. 1994. "A Mutual Exploitation Model of Media Influence in U.S. Foreign Policy". In W. Lance Bennet and David Paletz, eds. *Taken by Storm: The Media, Publik Opinion, and U.S. Foreign Policy in the Gulf War*. Chicago: University of Chicago.
- Poole, Avery. 2015. "The Foreign Policy Nexus: National Interest, Political Values and Identity". Dalam *Indonesia's Ascent: Power, Leadership and The Regional Order*. Edited by Christopher Roberts, Ahmad Habir and Leonard Sebastian. London: Palgrave Macmillan.
- Rosenau, James N. 1976. "Restlessness, Change and Foreign Policy Analysis." Dalam *In Search of Global Pattersn*, edited by James N. Rosenau, pp 369-376. New York: Free Press.
- Tarock, Adam. 2006. "Iran's Nuclear Programme and the West". *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 4, pp 645 – 664.
- Acuan artikel dalam Jurnal:**
- Anwar, Dewi Fortuna. 2010. "The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy". *Southeast Asian Affairs*, pp. 126-141.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2010. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia". *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 3, pp. 37-54.
- Bahgat, Gawdat. 2006 "Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran". *Iranian Studies*. Volume 39, number 3. September 2006.
- Bowen, Wyn Q. and Jonathan Brewer."Iran's Nuclear Challenge: Nine Years and Counting". *International Affairs* 87:4 (2011) 923–943
- Clarke, Michael. 2013. "Iran as a 'pariah' Nuclear Aspirant". *Australian Journal of International Affairs*. Vol. 67, No. 4, 491-510.
- Dupont, Pierre-Emmanuel. 2014. "Compliance with Treaties in the Context of Nuclear Non-proliferation: Assessing Claims in the Case of Iran". Dalam *Journal of Conflict & Security Law* .Vol. 19 No. 2, 161–210.
- Gindarsah, Iis. 2012. "Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007–08." Dalam *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* Volume 34, Number 3, December 2012 pp. 416-437.
- Gustavsson, Jakob. 1999. "How Should We Study Foreign Policy Change?" *Cooperation dan Conflict*. Vol. 34 (1), 73-75. London: Sage Publications.
- Kibaroglu, Mustafa. "Iran's Nuclear Ambitions from Historical Perspective and the Attitude of the West". *Middle Eastern Studies*. Vol.43. No2. 223-245, March 2007.

- Mansour, Imad. 2008. "Iran and Instability in the Middle East". *International Journal*. Autumn 2008.
- Murphy, Ann Marie. 2008. "Indonesia Returns to the International Stage: Good News for the United States". Dalam *Orbis*, Volume 53, Issue 1, January 2009, Pages 65–79.
- Murphy, Ann Marie. 2012. "Democratization and Indonesian Foreign Policy: Implications for the United States". Dalam *Asia Policy*, Number 13, January 2012, pp. 83-111.
- Nugraha, Ekky. 2014. Dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 Tentang Program Nuklir Iran. Dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2, Nomor 2, 2014: 401-410.
- Putri, Inggried Christhiansend Purnomo. 2011. "Tuntutan Publik Islam di Tingkat Domestik pada Masa Pemerintahan SBY (2004-2009) terhadap Kebijakan Indonesia atas Kasus Nuklir Iran". Dalam *Jurnal Studi Hubungan Internasional*. Vol 1, No 1.
- Robinson, P.1999. "The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy?" Dalam *Review of International Studies*, 25(02), pp.301-309.
- Robinson, Piers. 2001. "Theorizing the Influence of Media on World Politics Modelsof Media Influence on Foreign Policy". Dalam *European Journal of Communication*, Vol 16(4): 523–544.
- Ruland, Jurgen. 2016. "Democratizing Foreign Policy Making in Indonesia and Democratization of ASEAN: A role of Theory Analysis." *TRaNS: Trans –Regional and –National Studies of Southeast Asia*. Page 1 of 25, 2016.
- Acuan artikel dalam website:**
- Rinaldy, Ridho. 2013. "Komunikasi Lintas Budaya", dalam *ridhorinaldy.wordpress.com* diakses 7 Januari 2017.
- Siagian, Sabam. 2011. *Media Plays Indirect Role in Forming Foreign Policy*. The Jakarta Post. September 15, 2011.
- Ahmadinejad ke Muhammadiyah. <https://news.detik.com/berita/d-593588/ahmadinejad-ke-muhammadiyah>. Diakses November 2018.
- Ahmadinejad: Program Nuklir Iran Untuk Tujuan Damai. 12 Mei 2006. <http://www.nu.or.id/post/read/4443/ahmadinejad-program-nuklir-iran-untuk-tujuan-damai>. Diakses November 2018. Diakses November 2018.
- Tangani Iran, Presiden SBY Telepon Ahmadinejad dan Mbeki. https://news.detik.com/berita/d-757779/tangani-iran-presiden-sby-telepon-ahmadinejad-dan-mbeki?_ga=2.84349150.61987068.1552974667-1798513985.1530692236. Diakses Desember 2018.
- Iran Yakinkan NU Program Nuklirnya Bertujuan Damai. <http://www.nu.or.id/post/read/5790/iran-yakinkan-nu-program-nuklirnya-bertujuan-damai>. Diakses November 2018.
- Menit-Menit Kritis yang Mengubah Sikap Indonesia Terhadap Iran. <https://www.antaraneews.com/berita/57847/menit-menit-kritis-yang-mengubah-sikap-indonesia-terhadap-iran>. Diakses November 2018.
- Sidang IAEA: Nuklir Iran, DPR RI Sesalkan Menlu Abstain. Media

- Indonesia 16 Februari 2006. Sumber: Arsip Media Indonesia.
- Basyar, Hamdan anksi Baru untuk Nuklir Iran. Dalam <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/285-sanksi-baru-untuk-nuklir-iran.html>. Diakses Januari 2019.
- Background and Status of Iran's Nuclear Program. https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-Iranian-Nuclear-Puzzle/2014/06/Section_one. Diakses Desember 2018.
- Lieggi, Stephanie. The Nonproliferation Tiger: Indonesia's Impact on Nonproliferation in Asia and Beyond. <http://www.nti.org/analysis/articles/nonproliferation-tiger-indonesias-impact-nonproliferation-asia-and-beyond/>. Diakses 14 April 2018.
- GNB Serukan Lawan Hegemoni Amerika. 17 September 2006. Media Indonesia 17 September 2006. Arsip Media Indonesia.
- Gerakan Non-Blok Dukung Iran. Media Indonesia. 31 Mei 2006. Arsip Media Indonesia.
- Kunjungan Ahmadinejad. Media Indonesia 11 Mei 2006. Arsip Media Indonesia
- Megawati: Resolusi DK PBB untuk Iran, Seharusnya RI Abstain. https://news.detik.com/berita/d-760683/megawati-resolusi-dk-pbb-untuk-iran-seharusnya-ri-abstain?_ga=2.82180049.61987068.1552974667-1798513985.1530692236. Diakses November 2018.
- PKS Kecewa Sikap Plin-plan Pemerintah Soal Nuklir Iran. https://news.detik.com/berita/d-758801/pks-kecewa-sikap-plin-plan-pemerintah-soal-nuklir-iran?_ga=2.45169635.61987068.1552974667-1798513985.1530692236. Diakses Oktober 2018.
- RI Jangan Dukung Sanksi Baru PBB Ke Iran. <https://www.merdeka.com/politik/ri-jangan-dukung-sanksi-baru-pbb-ke-iran-lxjppzg.html>. Diakses Oktober 2018.
- Demo Cabut Dukungan Resolusi DK PBB Dekat Istana Bogor. <https://www.antaranews.com/berita/57826/demo-cabut-dukungan-resolusi-dk-pbb-dekat-istana-bogor>. Diakses November 2018.
- Din: RI Jangan Jalankan Skenario Adikuasa Caplok Iran. https://news.detik.com/berita/d-759406/din-ri-jangan-jalankan-skenario-adikuasa-caplok-iran?_ga=2.36640103.61987068.1552974667-1798513985.1530692236. Diakses November 2018.
- Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Dr. Mahmoud Ahmadinejad ke Indonesia, 10-12 Mei 2006. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Kenegaraan-Presiden-Republik-Islam-Iran-Dr.-Mahmoud-Ahmadinejad-ke-Indonesia-10-12-Mei-200.aspx>. Diakses 11 Mei 2018.